

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Selama bertahun-tahun dunia internasional telah menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan yang disebabkan oleh kejahatan domestik maupun kejahatan transnasional. Ancaman terhadap keamanan internasional menjadi semakin kompleks dengan adanya pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi dan perkembangan sosial-ekonomi dunia. Terutama pada wilayah perbatasan, negara-negara yang ada menjadi semakin rentan terhadap berbagai tindakan kriminal lintas negara seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, pencucian uang hingga kejahatan siber. Keberlangsungan tindak kejahatan di wilayah perbatasan melibatkan banyak aktor besar yang membuat negara dan pihak berwajib mengalami kesulitan untuk menangani dan memberantas kejahatan ini.

Kartel Sinaloa menjadi salah satu aktor kejahatan transnasional yang menjadi perhatian utama dunia terutama bagi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Kartel Sinaloa merupakan kartel narkoba yang berbasis di Meksiko Barat dan telah memiliki pengaruh besar di dunia internasional selama bertahun-tahun. Struktur, strategi dan keterbukaan mereka telah menarik perhatian dunia, dimana kartel ini memiliki struktur yang terdesentralisasi dari organisasi kecil lainnya yang diatur secara kurang ketat. Hal ini membuat kartel ini rentan terhadap konflik,

namun hal ini juga memudahkan kartel ini untuk beradaptasi dalam lingkungan yang penuh persaingan dan ketidakstabilan.

Kartel Sinaloa ini didirikan oleh anggota Kartel Guadalajara yaitu Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, yang juga dikenal dengan nama El Chapo, setelah pemimpin Kartel Guadalajara ditangkap pada tahun 1989. Kartel Sinaloa bertumbuh dengan cepat dan menjadi simbol kekuatan dan kebrutalan kartel Meksiko. Sebagai salah satu kartel terbesar, aktivitas kartel Sinaloa meliputi produksi, distribusi, transportasi berbagai jenis narkotika seperti ganja, heroin, kokain, *fentanyl*, dan *methamphetamine* ke seluruh bagian Meksiko maupun beberapa negara lainnya melalui jalur darat maupun udara. Kartel ini memiliki jaringan internasional yang sangat luas, mencakup Eropa, Amerika Serikat, Asia, Afrika, maupun Australia (Rizal, 2023).

Sejak didirikan pada tahun 1989 hingga 2019, berbagai pelanggaran terkait perdagangan narkoba, penggunaan senjata api, pencucian uang, dan pembunuhan telah dilakukan oleh kartel Sinaloa. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, kartel ini telah memperdagangkan puluhan ribu kilogram narkotika ke berbagai negara dengan berbagai metode, seperti melalui kapal selam, kereta api dengan kompartemen rahasia, pesawat terbang serat karbon, dan juga terowongan bawah tanah lintas negara. Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat telah melakukan salah satu penyitaan terbesar terkait barang dagangan kartel Sinaloa, dimana telah ditemukan lebih dari tujuh ton kokain yang disembunyikan dalam kaleng jalapeno di Pelabuhan San Diego (US Immigration and Customs Enforcement, 2019a).

Untuk mengoperasikan berbagai aktivitas kriminalnya, kartel ini menggunakan jaringan komunikasi terenkripsi yang dibeli dan dibuat khusus untuk mendukung keberlangsungan kartel. El Chapo membayar satu juta dolar untuk sistem ini, sehingga anggota kartel yang tersebar di Kolombia, Ekuador, Kanada dan Amerika Serikat dapat berkomunikasi melalui telepon seluler dan aplikasi khusus tanpa takut terdeteksi oleh para pesaingnya maupun oleh pihak penegak hukum. Kartel ini juga memanfaatkan jaringannya dengan berbagai pejabat pemerintah yang korup untuk mendukung aksinya. Berbagai tingkat pemerintah turut dilibatkan dalam keberlangsungan kartel ini, dimana imbalan senilai jutaan dolar diberikan bagi petugas penegak hukum lokal, penjaga penjara, pejabat negara, anggota angkatan bersenjata yang memiliki pangkat tinggi dan politisi untuk menutup mata atas berbagai tindakan ilegal mereka dan memberikan informasi untuk menghindari penangkapan (US Immigration and Customs Enforcement, 2019b).

Keberhasilan kartel Sinaloa juga tidak lepas dari penggunaan kekerasan dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Pemimpin kartel Sinaloa memiliki *sicario* atau pembunuh bayaran yang bertugas untuk menculik, menginterogasi, menyiksa dan menembak anggota organisasi kejahatan yang menjadi saingannya. Kartel ini juga memiliki akses tak terbatas terhadap senjata api, dimana berbagai pistol genggam, senjata AK-47, granat, dan granat bertenaga roket menjadi aset mereka. Dengan keuntungan miliaran dolar yang dimiliki kartel Sinaloa, El Chapo juga menggunakan berbagai metode pencucian uang dan penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar dari wilayah Amerika Serikat ke Meksiko. Kartel ini memiliki

banyak perusahaan cangkang seperti perusahaan jus dan perusahaan tepung ikan untuk mencuci uang hasil perdagangan narkoba mereka (US Department of Justice, 2019).

Melihat besarnya aksi dan dampak dari kejahatan yang dilakukan kartel di wilayah perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, kedua pemerintahan ini mengambil tindakan untuk bekerjasama sejak tahun 2008 untuk menangani dan mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan mereka. Kerja sama antara keduanya dikenal sebagai *Merida Initiative*, yang berawal dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi antara Presiden George W. Bush dan Presiden Felipe Calderón di Merida, pada 14 Maret 2007. Meksiko dan Amerika Serikat bersepakat untuk menjadikan isu kejahatan transnasional sebagai isu utama dalam hubungan kerjasama mereka, untuk terus menjaga stabilitas kawasan serta menjaga keselamatan masyarakatnya. *Merida Initiative* ini diresmikan pada 11 Juni 2008, melalui *The Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act*. Melalui *Merida Initiative* lembaga penegak hukum di kedua negara memainkan perannya, seperti Drug Enforcement Administration (DEA) dan Federal Bureau of Investigation (FBI) bersama lembaga penegak hukum Meksiko lainnya dalam berbagai program, seperti *Transnational Anti-Gang Initiative* (TAG), *Southwest Intelligence Group* (SWIG), *Central American Fingerprint Exploitation Initiative* (CAFÉ) dan *Southwest Border Corruption Task Forces* (M. W. Pratiwi, 2018).

Untuk mendukung keberlangsungan program *Merida Initiative*, pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 2011 menyetujui kerangka kerja strategis

yang dikenal sebagai *the Four Pillars*. (US Embassy & Consulates in Mexico, 2021) Pilar pertama adalah *Disrupt Capacity of Organized Crime to Operate*, dengan pilar ini kedua pemerintah menggunakan teknologi dan pelatihan untuk mengurangi kemampuan kartel, seperti mendanai UNODC sebesar 1.3 juta USD untuk menjalankan studi terkait hasil opium dan budidaya poppy atau lebih dikenal sebagai MEX-K54, membentuk program *The Southern Border Telecommunications* (SOBOT) senilai 52 juta USD untuk meningkatkan kemampuan badan migrasi dan penegak hukum untuk berkoordinasi, dan kedua pemerintah juga menyumbangkan anjing pelacak kepada badan federal, negara bagian dan militer Meksiko, serta mensponsori pelatihan anjing pelacak untuk mendeteksi senjata, amunisi, uang dan obat-obatan.

Pilar kedua yaitu *Institutionalize Capacity to Sustain Rule of Law*, melalui kerja sama ini telah disumbangkan 406 juta USD untuk mendukung transisi sistem peradilan pidana baru Meksiko. Telah dilakukan penilaian, akreditasi, sertifikasi laboratorium forensik, penyediaan paket peralatan elektronik ruang sidang untuk mendukung persidangan lisan, pelatihan jaksa dan penyidik serta anggota peradilan lainnya, pertukaran jaksa agung pada tingkat negara bagian, pengembangan instruktur akademi kepolisian federal serta pelatihan pengawasan dan investigasi khusus, dan seminar hukum bagi para profesor dan mahasiswa,

Pada pilar ketiga yaitu *Create a 21st Century Border Structure, Merida Initiative* telah memberikan bantuan kepada Meksiko untuk meningkatkan standar kinerja yang lebih baik pada perbatasan darat, udara dan pelabuhan dengan menggunakan kebijakan, prosedur dan teknologi yang lebih modern. Bersama

Transportation Security Administration (TSA), *Merida Initiative* meningkatkan infrastruktur keamanan bandara yang memiliki penerbangan ke Amerika Serikat dengan alat pemindai tubuh dan pendeteksi barang. *Merida Initiative* juga bekerjasama dengan *U.S. Coast Guard* untuk memberikan bantuan teknis bagi Angkatan Laut Meksiko dalam rangka meningkatkan manajemen pelabuhan. Selain itu, hubungan kerja sama ini telah mendanai penelitian *U.S. Customs and Border Protection (CBP)* dan *Mexican Customs (ANAM)* sebesar 3.4 juta USD untuk meningkatkan keamanan dan perdagangan melalui integrasi operasi dan teknologi di wilayah perbatasan.

Build Strong and Resilient Communities sebagai pilar keempat membawa *Merida Initiative* untuk membentuk badan negara untuk sertifikasi profesional hukum dengan tujuan meningkatkan standar secara objektif untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan dari jaksa dan pembela hukum yang tersedia di Meksiko. *United States Agency for International Development (USAID)* telah meningkatkan koordinasi antara pengadilan, jaksa, polisi dan masyarakat di negara bagian serta mengembangkan solusi bagi masalah peradilan pidana. USAID juga telah bekerjasama dengan pihak swasta, akademisi serta negara bagian untuk membentuk program bagi para remaja yang berisiko, seperti *Jóvenes con Rumbo (Youth with Direction)*, *Proyectos de Prevención del Crimen y la Violencia (Crime and Violence Prevention Projects)* dan *Seguridad Juvenil (Youth Security)*.

Selama 30 tahun El Chapo menjadi pemimpin kartel Sinaloa, terlihat keberhasilannya dalam melakukan berbagai tindakan kejahatan transnasional. Namun pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat tidak berhenti untuk mengejar

dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kartel ini. Pada akhirnya El Chapo berhasil diadili dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2019, setelah dilakukan tiga kali penangkapan pada tahun 1993, 2014 dan 2016 yang berujung pada ekstradisinya ke Amerika Serikat pada tahun 2017. Dengan berakhirnya kepemimpinan Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, anak-anaknya yang dikenal sebagai Los Chapitos bersama Ismael El Mayo Zambada melanjutkan operasi kartel Sinaloa dengan strategi yang berbeda dari pendahulunya (US Department of The Treasury, 2023).

Sejak tahun 2020 dunia menghadapi pandemi COVID-19, kartel Sinaloa mulai mengubah strategi organisasi mereka dengan melakukan propaganda untuk menarik perhatian yang lebih positif pada tindakan mereka. Melalui sosial media, kartel ini membagikan pesan kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan pandangan yang baik, terutama penilaian bahwa kartel ini merupakan pahlawan dan pelindung masyarakat. Propaganda ini semakin gencar dilakukan pada masa-masa ini, dimana kartel Sinaloa memberikan paket bantuan kesehatan dan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan putri El-Chapo juga turut bertindak dalam melakukan propaganda ini dengan membagikan minyak, nasi, gula dan berbagai kebutuhan lainnya dalam kotak-kotak yang dibagikan di kota Guadalajara (Jorgic, 2020)

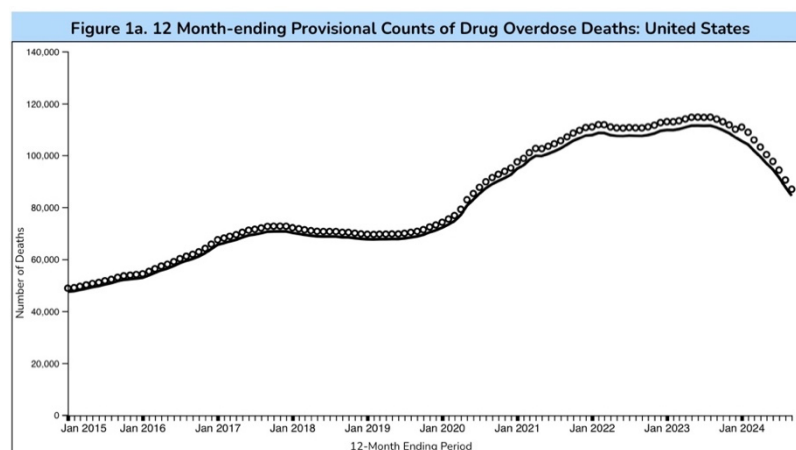
Tidak hanya itu, dunia yang mengalami resesi ekonomi juga membuat masyarakat melihat bahwa tindakan kriminal seperti perdagangan manusia maupun narkoba dapat memberikan kemampuan bertahan hidup dan membantu mereka menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Dalam hal ini masyarakat memberikan

peran lebih pada kartel untuk melakukan aksinya, dimana kesempatan untuk memperjualbelikan produk-produk ilegal semakin mudah dengan menyusupkan narkoba ke dalam perdagangan pasokan medis seperti masker bedah, disinfektan dan berbagai alat tes COVID-19. Keadaan ekonomi yang sulit pada masa pandemi juga membawa tekanan emosional bagi masyarakat, sehingga angka permintaan akan zat-zat psikotropika semakin meningkat pada masa-masa ini. Aktor-aktor kejahatan transnasional seperti kartel Sinaloa semakin melancarkan perdagangannya pada masa pandemi karena kehilangan perhatian dari dunia yang sedang fokus dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Kemampuan adaptasi kartel ini tidak sesuai dengan ekspektasi banyak pihak khususnya UNODC, yang awalnya diperkirakan kejahatan transnasional akan menurun akibat penutupan perbatasan, malah harus menghadapi kenyataan yang berbanding terbalik (Cruz & Fonseca, 2021).

Selama ini kartel Sinaloa telah aktif melakukan perdagangan narkoba seperti heroin, ganja dan narkoba sintetis ke wilayah Amerika Serikat yang mengakibatkan ratusan ribu penggunanya kehilangan nyawa. Pada awal pandemi, perdagangan kartel ini sempat terhambat terutama ke wilayah Amerika Serikat akibat wilayah perbatasan yang dijaga ketat dan meningkatnya harga bahan baku. Namun dengan adanya tantangan ini tidak menutup keuntungan bagi kartel Sinaloa, mengingat para klien di wilayah Amerika Serikat dan negara lain telah mengalami kecanduan yang menuntut mereka untuk membayar berapa pun harganya. Untuk meminimalisir hambatan di perbatasan, kartel Sinaloa juga mengeksploitasi para penjaga di kedua negara seperti yang terjadi di Ciudad Juárez dan El Paso,

Texas. Setelah tiba di wilayah Amerika Serikat, produk-produk ini didistribusikan ke setiap negara bagian dan dijual satuan di berbagai tempat seperti New York dengan harga 3 USD per item. (Corona, 2023) Jutaan dolar yang dihasilkan pada setiap pengiriman akan dikirim kembali ke Meksiko melalui transfer ke negara bebas pajak ataupun mata uang kripto. Teknologi mata uang kripto semakin memudahkan keberlangsungan operasi kartel Sinaloa, dimana beberapa mitra menerima pembayaran langsung dengan mata uang kripto serta aliran dana menggunakan teknologi ini lebih sulit untuk dideteksi (TRM Insight, 2023).

Kartel Sinaloa dalam kepemimpinan anak-anak El Chapo dinilai lebih tangguh dan mematikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Para ahli waris El Chapo ini memperbaharui mekanisme perdagangan narkoba dan memperkuat jaringan globalnya untuk terus mempertahankan eksistensi kartelnya sebagai kartel terkuat. Meskipun beberapa anggota kartel ini telah didakwa dan menerima hukumannya, operasional kartel ini terus berlangsung dengan mengandalkan *cryptocurrency* untuk mencuci uang dan mengaburkan pergerakan uang mereka untuk terus memproduksi *fentanyl* dan *methamphetamine* secara massal.



Gambar 1.1 Angka Kematian Akibat Overdosis di Amerika Serikat Tahun 2015-2024
Sumber: National Center for Health Statistics, 2025

Melihat data yang dipublikasikan oleh *CDC's National Center for Health Statistics*, angka kematian akibat overdosis di Amerika Serikat pada tahun 2020 meningkat sebesar 30% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 kembali meningkat hampir 15% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 107.622 kematian. Dari angka tersebut, 80.816 kasus diantaranya disebabkan oleh overdosis opioid sintetis seperti *fentanyl* dan *methamphetamine* (National Center for Health Statistics, 2022).

Melihat besarnya dampak yang dialami oleh masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh kartel ini, pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat semakin meningkatkan upaya kerjasamanya dengan membentuk *Mexico-United States Bicentennial Framework for Security, Public Health and Safe Communities* pada tahun 2021 menggantikan *Merida Initiative* yang telah berlangsung selama 13 tahun. Pemerintah Amerika Serikat semakin gencar menargetkan para pemimpin kartel Sinaloa untuk melakukan penangkapan dan pembongkaran jaringan kartel mereka untuk mengurangi frekuensi perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia (Hamilton, 2020; InSight Crime, 2024).

Fleksibilitas kartel ini memang semakin mengkhawatirkan, tidak hanya mengenai adaptasi kartel terhadap pandemi, tetapi juga pada kemampuan mengembangkan strategi jangka panjang mereka. Melihat frekuensi kejahatan transnasional yang tidak menurun meskipun *Merida Initiative* dan berbagai upaya kerja sama lainnya antara Meksiko dan Amerika Serikat telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2020, penulis melihat adanya urgensi untuk meneliti lebih lanjut terkait topik ini. Dimana pada berbagai penelitian terdahulu hanya berfokus pada kerjasama *Merida Initiative*, seperti 'Implementasi Kerjasama *Merida Initiative*

Antara Amerika Serikat dan Meksiko Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal (2008-2010)’ yang ditulis oleh Mega Wahyu Pratiwi pada tahun 2018, ‘Efektivitas Kerjasama Meksiko Dengan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba (*Merida Initiative* Pada Tahun 2007-2012)’ oleh Jamil Reza pada tahun 2020, dan ‘Kebijakan Meksiko Untuk Menandatangani *Merida Initiative* Untuk Menghadapi Drug Trafficking Organizations Dengan Amerika Serikat di Meksiko 2007-2012)’ oleh Retno Afifah Puspita pada tahun 2023. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada perkembangan hubungan kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat pasca *Merida Initiative*, untuk menemukan apa saja langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh kartel Sinaloa yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Melihat adanya urgensi pada uraian latar belakang diatas, penulis mengambil judul penelitian **Analisis Kerjasama Meksiko-Amerika Serikat Melalui Bicentennial Framework dalam Menangani Kejahatan Transnasional Kartel Sinaloa Tahun 2021-2023.**

1.2.Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus utama pada perkembangan kerjasama pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat dalam menangani kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023, yaitu pasca *Merida Initiative*. Penulis menentukan batasan aktor penelitian pada Kartel Sinaloa sebagai kartel narkoba Meksiko yang memiliki pengaruh besar di dunia

internasional selama bertahun-tahun. Kartel ini telah menarik perhatian dunia dari segi struktur dan strategi perdagangan mereka sehingga aktivitas kartel Sinaloa semakin berkembang mencakup wilayah Amerika Serikat dan beberapa wilayah lainnya seperti Eropa, Asia, Afrika maupun Australia melalui jalur darat maupun udara.

Penulis memilih untuk memfokuskan penelitian ini pada hubungan bilateral antara Meksiko dan Amerika Serikat dalam menangani kejahatan transnasional Kartel Sinaloa oleh karena kedua negara ini berbatasan langsung pada wilayah darat yang menjadi pintu utama terjadinya berbagai bentuk perdagangan ilegal yang dilakukan Kartel Sinaloa. Adapun periode waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup tahun 2021 hingga 2023, dimana *Merida Initiative* telah digantikan oleh *Mexico-United States Bicentennial Framework for Security, Public Health and Safe Communities*, serta penulis menilai adanya perubahan signifikan dalam propaganda dan strategi perdagangan Kartel Sinaloa sejak pandemi COVID-19. Terkait akan hal itu, penelitian ini akan melihat lebih dalam pada kerjasama terbaru antara Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat, dan perubahan strategi mereka dalam menangani dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan transnasional yang terjadi wilayah perbatasan negara mereka.

Merujuk pada batasan masalah yang telah ditetapkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* dalam menangani Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023?

2. Bagaimana tantangan kerjasama pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* dalam menangani Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan merujuk rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis kerjasama pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* dalam menangani kejahatan transnasional Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023 ;
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat dalam bekerjasama menangani kejahatan transnasional Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023.

Beberapa manfaat dan signifikansi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi Hubungan Internasional mengenai bagaimana kerjasama bilateral yang dilakukan antara Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* dalam menangani dan mengatasi kejahatan transnasional yang terus berkembang, serta melihat hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat dalam bekerjasama menangani kejahatan transnasional Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023 ;

2. Dapat memperkaya kajian dalam bidang hubungan internasional khususnya pada studi keamanan internasional serta kerja sama bilateral dalam penegakan hukum internasional ;
3. Dapat menjadi referensi serta memperluas wawasan bagi para pembuat kebijakan yang ada di dunia internasional, dan juga menjadi bahan evaluasi efektivitas strategi kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat sehingga pada perumusan kebijakan selanjutnya akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam menangani dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para aktor kriminal seperti Kartel Sinaloa.

1.4.Kerangka Konseptual

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya, penulis akan menggunakan dua konsep utama yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel yang akan dikaji, yaitu kerja sama keamanan bilateral dan kejahatan transnasional. Dengan demikian, berikut adalah penjelasan mengenai ketiga konsep tersebut dan keterkaitannya dengan penelitian ini :

1.4.1. Kerjasama Keamanan Bilateral (*Bilateral Security Cooperation*)

Dalam studi hubungan internasional terdapat berbagai macam pendekatan akademik mengenai makna dari kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat dipahami sebagai hubungan antara dua negara berdaulat yang memberikan pengaruh bagi satu sama lain dalam rangka memperoleh penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang melibatkan negaranya masing-masing (Candra, 2022).

Kerjasama bilateral ini dapat berupa perjanjian dan perundingan yang membahas isu-isu tertentu baik sebagai bentuk preventif, penanganan, maupun penyelesaian dari suatu masalah yang menjadi kepentingan utama bagi kedua negara yang terlibat.

Menurut Holsti, kerjasama bilateral merupakan bentuk dari dua kepentingan atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu untuk dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak terkait dengan harapan bahwa kebijakan yang diambil dapat membantu setiap negara untuk mencapai kepentingan maupun nilai-nilai bersama, serta mengatur aturan resmi maupun tidak resmi mengenai berbagai transaksi di masa depan yang akan dilakukan dengan tujuan memenuhi kepentingan bersama (C. A. Pratiwi, 2021). Pandangan ini menjalankan hubungan bilateral sebagai kerangka kerja konseptual dari hubungan timbal balik antara kedua pihak yang terlibat dengan motif memelihara kepentingan nasional, perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dalam hal ini isu keamanan menjadi fokus utama dalam kerjasama bilateral, dimana keterlibatan negara dari wilayah terdekat untuk bekerjasama tentu menghasilkan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Kerja sama keamanan sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Defense Reform Initiative (DRI) pada tahun 1997. Pada awalnya Defense Security Assistance Agency (DSAA) memegang tanggung jawab atas program bantuan keamanan, namun DRI meminta DSAA juga turut mengelola program internasional yang di danai oleh U.S. Department of Defense (DoD) bersama dengan sumber daya lainnya, maka dari itu pada 1 Oktober 1998, DSAA ditetapkan kembali

sebagai Defense Security Cooperation Agency (DSCA) (Defense Security Cooperation University, 2023).

Melalui DSCA, U.S. Department of Defense (DoD) mendefinisikan kerjasama keamanan (*security cooperation/SC*) sebagai seluruh interaksi DoD dengan institusi asing baik negara maupun organisasi untuk membangun hubungan pertahanan yang mengedepankan kepentingan yang ada, terutama bagi Amerika Serikat. Dalam kerjasama keamanan terdapat tiga tujuan utama yaitu, membangun dan mengembangkan kemampuan keamanan sekutu untuk pertahanan diri serta operasi multinasional, memberikan akses bagi angkatan bersenjata ke negara asing selama masa damai maupun operasi darurat, dan menciptakan hubungan yang mendukung kepentingan keamanan bersama. Kerjasama keamanan menjadi bagian penting dari misi sebuah negara dalam memenuhi kepentingan nasional dan sebuah alat dalam membangun hubungan diplomatik. Maka dari itu seluruh tujuan kerjasama keamanan yang dirancang oleh DoD harus selaras dengan strategi negara yang ditetapkan oleh *Department of States* (DoS) (Schafer et al., 2024).

Sedangkan menurut Douglas M. Faherty, kerjasama keamanan merupakan kegiatan terstruktur, terorganisir dan dikelola secara formal yang mengatur interaksi antara entitas yang memiliki program yang bertujuan untuk membangun kesepahaman antar mitra untuk memastikan bantuan militer yang dapat diakses saat diperlukan. Faherty juga menilai bahwa kerjasama keamanan harus selaras dengan tujuan nasional dengan memperluas pilihan kebijakan dan mencegah perkembangan tak terduga dari mitra kerjasama (Faherty, 2012). Maka dari itu, kerjasama keamanan bilateral adalah hubungan antara dua entitas yang memiliki

kepentingan yang sama yaitu untuk mengatasi segala kejahatan yang menjadi ancaman dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan nasionalnya.

Dalam kerjasama keamanan terdapat berbagai bentuk yang mencakup program-program yang telah ditetapkan oleh Foreign Assistance Act (FAA) dan Arms Export Control Act (AECA) dibawah yurisdiksi *US Department of States* (DoS) (Secretary of Defense, 2024), yaitu :

1. Hubungan Militer dan Militer (*Military to Military Engagements*)¹
2. Pelatihan dengan Tentara Asing (*Training with Foreign Forces*)²
3. Dukungan Terhadap Operasi (*Support to Operations*)³
4. Pendanaan untuk Kerjasama Pasukan Keamanan (*Partner Security Forces Funds*)⁴
5. Kerjasama Pengurangan Ancaman Senjata Pemusnah Massal (*Cooperative Threat Reduction Activities*)⁵

¹ Pengembangan interaksi antara *US Forces* dengan pasukan keamanan negara mitra, termasuk juga pertukaran personel dan upaya kerjasama lainnya.

² Pelatihan militer dan non-militer antar negara mitra yang juga mencakup biaya pelatihan dan dukungan lainnya yang dibutuhkan.

³ Penyediaan logistik, perlengkapan, layanan, pelatihan khusus, peminjaman peralatan dan penggantian biaya bantuan operasi militer.

⁴ Program kerjasama yang membiayai upaya untuk mengembangkan, memelihara dan meningkatkan profesionalitas pasukan pertahanan dan keamanan negara mitra, terutama di wilayah Irak dan Suriah untuk mencegah kebangkitan ISIS

⁵ Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dari penggunaan senjata pemusnah massal (WMD) dengan bekerjasama dengan organisasi sipil maupun militer di negara mitra.

6. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)⁶
7. Program Pendidikan dan Pelatihan (*Educational and Training Activities*)⁷
8. Pengembangan Manajemen, Infrastruktur dan Tenaga Kerja (*Management, Infrastructure and Workforce Development*)⁸
9. Program Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Assistance Activities*)⁹

Bentuk-bentuk kerjasama keamanan ini akan meminimalisir kerentanan negara dari berbagai situasi yang dihadapi, khususnya bagi negara yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang terbatas untuk melindungi negaranya.

Pada penelitian ini, konsep kerjasama keamanan bilateral akan digunakan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait hubungan antara pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat yang sejak lama telah bekerjasama dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan kedua negara ini. Dengan menggunakan konsep ini, penulis akan menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat khususnya pada periode

⁶ Program dan kegiatan kerjasama yang meningkatkan kemampuan pasukan keamanan negara mitra, kapasitas operasional dan kelembagaan, seperti penegakan hukum, pengendalian sipil atas militer, hak asasi manusia, serta penegakan hukum konflik bersenjata diantara mitra pasukan keamanan

⁷ Program bagi personel asing untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan oleh *U.S. Department of Defense*, termasuk juga dengan program dari *Regional Centers for Security Studies*.

⁸ Upaya administratif dan pengawasan terhadap infrastruktur pertahanan keamanan yang dimiliki oleh negara-negara yang bekerjasama, seperti manajemen personel, sistem IT, sarana dan prasarana, serta pelatihan tenaga kerja melalui program tersertifikasi.

⁹ Upaya kerjasama berupa bantuan kemanusiaan dan dukungan kemasyarakatan kepada negara mitra.

2021-2023 untuk menghadapi Kartel Sinaloa sebagai aktor kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan kawasan ini.

1.4.2. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Konsep kejahatan transnasional pertama kali diperkenalkan secara internasional pada tahun 1990-an dalam sebuah konferensi internasional yang berfokus pada upaya pencegahan tindak kriminal yaitu UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Istilah ini secara umum berkaitan dengan globalisasi, dimana hal ini menggambarkan adanya kompleksitas dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi, sebagai sebuah hasil dari pandangan bahwa kejahatan merupakan suatu bentuk bisnis (Prayuda, 2020).

Bertahun-tahun dunia menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan secara internasional yang membuat setiap negara tidak mampu mengatasi permasalahan ini tanpa melakukan kerja sama. Maka dari itu melalui UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada kesempatan tersebut mengidentifikasi 18 kategori kejahatan transnasional, yaitu ; pencucian uang, terorisme, pencurian artefak seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata, pembajakan pesawat terbang, perompakan laut, penipuan asuransi, kejahatan siber, kejahatan lingkungan hidup, perdagangan manusia, perdagangan organ manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, penipuan perbankan, infiltrasi bisnis legal, korupsi, penyuapan pejabat publik, dan penyuapan pejabat partai politik (Rifqi & Yudho Prakoso, 2020; Silvia, 2020).

Dalam konsep kejahatan transnasional, tindakan ini melibatkan banyak pihak yang menjadi penyedia barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang menjadikannya sebagai kejahatan yang terorganisir. Para pelaku tindakan kriminal ini didefinisikan sebagai *transnational networks*, *transnational organized groups* dan *transnational organization*. Tindakan kriminal seperti ini telah menciptakan ancaman yang signifikan terhadap keamanan negara maupun secara internasional karena kejahatan ini didasari oleh dorongan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan finansial. Menurut pendapat Albanese, perkembangan kejahatan ini pada setiap negara didukung oleh 5 (lima) faktor utama yaitu : regulasi pemerintah, kondisi perekonomian negara, efektivitas penegakan hukum, angka permintaan masyarakat akan sebuah barang atau jasa, serta perkembangan lingkungan sosial dan teknologi yang mempengaruhi pasar (Prayuda & Harto, 2020).

Konsep kejahatan transnasional juga dapat dilihat dari 2 sisi yaitu secara makro dan mikro. Menurut Van Dijk, kejahatan transnasional makro terdiri dari berbagai aktivitas kriminal lintas negara yang melibatkan jaringan kriminal global dan lokal, sedangkan kejahatan transnasional mikro dapat dipahami sebagai komponen yang lebih kecil dari tindakan-tindakan tersebut, dimana kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal lokal di wilayah yang lebih terfokus. Kelompok-kelompok ini secara khusus membantu dalam mengeksekusi berbagai kegiatan yang ilegal di negara tertentu (Numadi & Ma'rifat, 2023). Dalam prosesnya, komponen kejahatan transnasional mikro memainkan peran yang sangat penting, dimana kejahatan ini berlangsung secara lintas negara dan membutuhkan

tenaga dari *unskilled-labor* di wilayah operasi kriminal untuk menjalankan aksinya. Tindakan kriminal ini juga membutuhkan kerahasiaan sehingga aktor lokal dibutuhkan untuk mengurangi perpindahan dan komunikasi secara langsung oleh para aktor utama kejahatan ini. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, semakin memperbesar keuntungan bagi para pelaku makro kejahatan transnasional, yaitu pada proses eksekusi dan komunikasi terkait operasi kriminal mereka tidak perlu terlibat secara langsung tetapi mengandalkan kemampuan dari pelaku mikro yang ada.

Konsep kejahatan transnasional dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjelaskan tindakan Kartel Sinaloa sebagai aktor kriminal internasional yang memberikan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan pada kawasan Meksiko-Amerika Serikat maupun masyarakat internasional. Berbagai bentuk kejahatan transnasional telah dilakukan secara lebih intens oleh Kartel Sinaloa pada periode 2021-2023 terutama pada wilayah perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, sehingga pada penelitian ini diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat menganalisis tindakan kerjasama seperti apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

1.4.3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini memiliki dua variabel yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Dalam sebuah studi penelitian, variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh atau memiliki potensi menyebabkan perubahan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang memperoleh hasil atau efek yang dipengaruhi oleh

variabel independen. Kedua variabel ini akan dianalisis pada tingkat internasional menggunakan tiga aspek dengan uraian operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen	Variabel Independen	Kategori	Indikator
Kejahatan Transnasional Kartel Sinaloa Tahun 2021-2023	Kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat melalui <i>Bicentennial Framework</i>	Bidang Militer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Militer dan Militer 2. Pelatihan dengan Tentara Asing 3. Dukungan Terhadap Operasi 4. Pendanaan untuk Kerjasama Pasukan Keamanan 5. Kerjasama Pengurangan Ancaman Senjata Pemusnah Massal
		Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas 2. Program Pendidikan dan Pelatihan 3. Pengembangan Manajemen, Infrastruktur dan Tenaga Kerja
		Bidang Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Bantuan Kemanusiaan

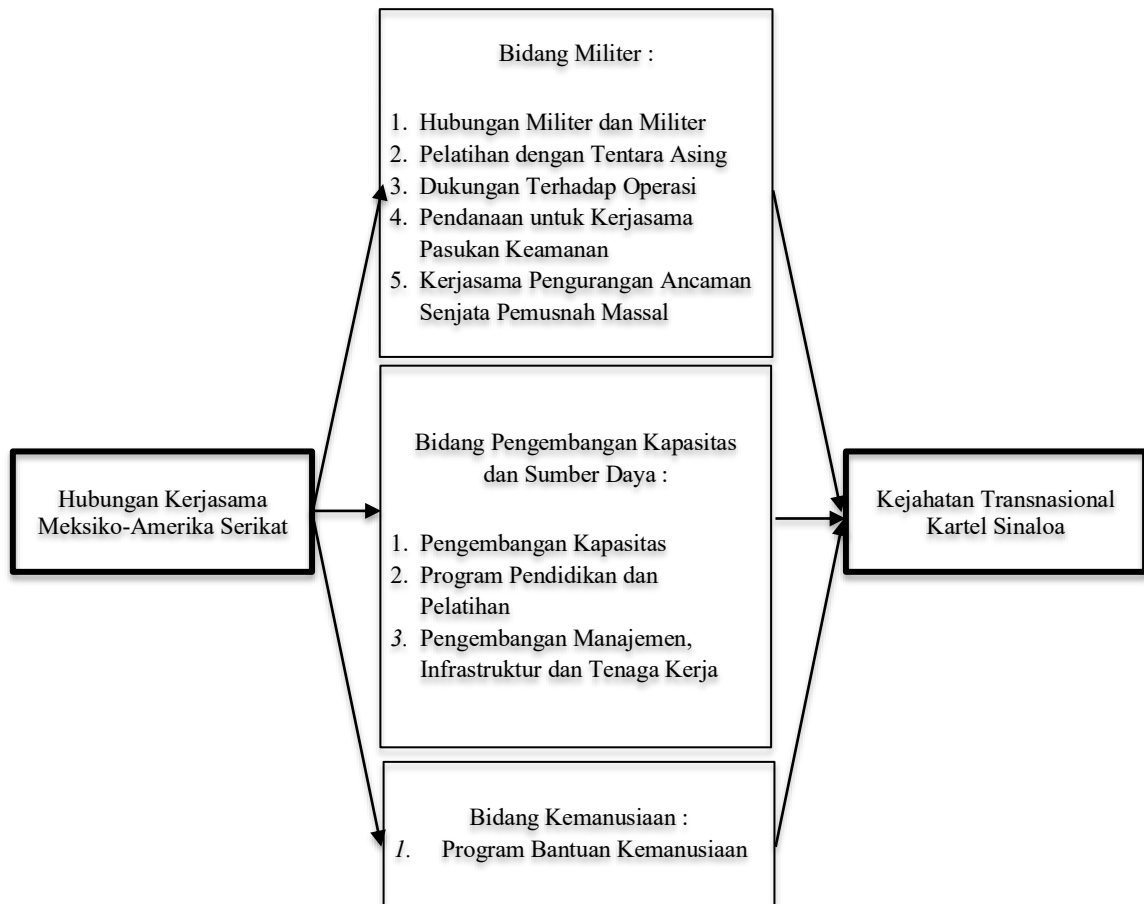
Sumber : Diolah oleh penulis, 2026

Variabel independen dalam penelitian ini adalah hubungan kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejahatan transnasional Kartel Sinaloa pada tahun 2021-2023. Hubungan kedua variabel ini akan dianalisis menggunakan tiga kategori kerjasama keamanan

bilateral seperti yang tertera pada tabel sehingga dapat menyajikan kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* serta tantangan yang dihadapi dalam menangani kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa pada tahun 2021-2023.

Kategori pertama yaitu bidang militer, akan melihat interaksi antara Meksiko dan Amerika Serikat yang dapat berupa pelatihan khusus, pertukaran personel, penyediaan logistik dan peralatan militer, serta pengamanan senjata untuk menghadapi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa. Kategori kedua adalah bidang pengembangan kapasitas dan sumber daya, dimana kedua negara ini berupaya meningkatkan kualitas operasional dan kelembagaan dalam berbagai bidang untuk mengoptimalkan proses penanganan kasus kejahatan transnasional. Kategori ketiga yaitu bidang kemanusiaan yang merupakan bentuk penanggulangan dari berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penulis akan menganalisis kerjasama dan tantangan yang dihadapi oleh Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* pada tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama keamanan bilateral yang ditetapkan oleh US Department of States.

1.4.4. Model Analisis



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Menurut Sandelowski, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mencakup berbagai perspektif dan metodologi yang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana individu memahami, mengalami, menafsirkan dan menciptakan dunia sosial (Mulyana et al., 2024). Adapun pendapat lain mengenai makna dari metode penelitian kualitatif oleh Cresswell yaitu, penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

kelompok orang dianggap masalah sosial atau kemanusiaan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai inkuiri naturalistik yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dan mengacu pada teori-teori tentang interpretasi dan pengalaman manusia. Landasan teori utama dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi, dan interaksi simbolik, kebudayaan serta etnometodologi menjadi landasan dasar tambahan (Sari et al., 2022). Pada penelitian kualitatif, sebuah penelitian memiliki tujuan utama untuk menemukan titik dari sebuah masalah yang ada dalam rumusan penelitian, kemudian peneliti akan menentukan model dari penelitiannya yang kemudian akan menghasilkan karakteristik, jenis dan teknik pengumpulan data hingga analisa data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mengkaji penelitiannya (Roosinda et al., 2021).

Penelitian ini akan menyajikan hasil analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu dengan menguraikan data dan fakta empiris yang kemudian dianalisis untuk mengembangkan kesimpulan umum. Pada penelitian ini penulis akan membahas perkembangan hubungan kerjasama pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat dalam mempertahankan keamanan negaranya dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa.

1.5.2. Jenis Data

Pada penelitian ini data sekunder akan digunakan penulis sebagai bahan analisis. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari objek penelitian, dimana peneliti memperoleh data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode, baik secara komersial maupun non-komersial

(Fadilla & Wulandari, 2023). Secara singkat data sekunder dapat dipahami sebagai data yang didapatkan dari penyajian oleh pihak lain. Data-data ini telah diolah sedemikian rupa untuk didokumentasi sehingga dapat digunakan oleh pihak lainnya (Hasan et al., 2022).

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur atau telaah pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang deskriptif dan kontekstual yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder melalui studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu, laporan tahunan, berita, pernyataan pemerintah, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun berbagai sumber yang digunakan penulis untuk studi literatur tersebut yaitu :

- a. United States Department of States
- b. United States Department of Treasury
- c. The White House Fact Sheet
- d. Washington Office on Latin America (WOLA)
- e. Institute for Economics and Peace : Mexico Peace Index
- f. Revista Mexicana de Politica Exterior
- g. TRM Insight
- h. InSight Crime
- i. The Brookings Institution
- j. Americas Quarterly

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu melalui proses sistematis untuk memahami dan mendefinisikan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola dan makna dari informasi yang ada. Penulis akan menguraikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh keterkaitan antar konsep dan fakta yang ada untuk menghasilkan kesimpulan akhir.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menghadapi dinamika dunia internasional, dalam hal ini kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat melalui institusi seperti *Bicentennial Framework*, teori liberalisme menjadi kunci untuk melihat kerangka konseptual yang digunakan penulis yaitu Kerjasama Keamanan Bilateral dan Kejahatan Transnasional. Dimana negara yang ada memainkan perannya dalam bidang keamanan sebagai mekanisme untuk mendukung stabilitas dunia. Disaat negara-negara memiliki kepentingannya masing-masing, namun mereka tetap dapat bekerja sama jika ada mekanisme dan instrumen yang memfasilitasi.

Liberalisme didasarkan pada argumen bahwa negara menjamin hak setiap individu untuk hidup secara bebas sebagai tujuan tertinggi pemerintah, sehingga kesejahteraan individu menjadi dasar dari sistem politik kaum liberal. Disaat negara diperhadapkan dengan ancaman dari luar dan mengambil langkah yang agresif seperti intervensi militer dan sanksi ekonomi, kaum liberal melihat tindakan ini sebagai strategi yang tidak konstruktif karena mengabaikan manfaat perdamaian dunia seperti perdagangan internasional, bantuan luar negeri dan legitimasi melalui pengakuan diplomatik. Menurut Daniel Deudney dan G. John Ikenberry, terdapat tiga faktor utama yang terkait dalam dunia liberal, yaitu ; hukum dan perjanjian internasional yang disertai organisasi internasional dapat menciptakan sistem internasional yang memberikan dampak signifikan bagi dunia internasional;

perkembangan perdagangan bebas oleh negara-negara liberal bersama organisasi internasional memberikan stabilitas dan kesejahteraan oleh karena sistem internasional yang terbuka sehingga meminimalisir potensi konflik; serta norma-norma internasional yang ada mendukung terjadinya kerjasama internasional, hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum (Meiser, 2018).

Liberalisme mengasumsikan bahwa pemerintah mewakili masyarakat yang menghasilkan kebijakan negara sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini membawa negara mengambil posisi dalam konflik ataupun kerjasama internasional menyesuaikan preferensi yang terdapat pada masyarakat. Setiap dinamika politik dipandang sebagai hasil dari pilihan sosial yang mencerminkan preferensi negara, dalam perspektif liberalisme yang menjadi prioritas bukanlah kekuasaan, melainkan mencapai tujuan negara melalui kerjasama dan kepentingan bersama (Moravcsik, 1992).

Interdependensi juga menjadi konsep penting lainnya dalam teori liberalisme yang dapat membantu kita untuk melihat fenomena ini, dimana negara terhubung satu sama lain melalui berbagai aspek seperti keamanan, ekonomi dan politik. Dalam hal ini isu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh organisasi seperti Kartel Sinaloa menjadi fokus utama Meksiko dan Amerika Serikat. Ancaman-ancaman seperti ini menciptakan kebutuhan bagi negara-negara untuk bekerja sama lebih erat untuk mengembangkan strategi dalam menghadapi ancaman transnasional yang ada (McCann & Kahraman, 2025).

Teori ini melihat bahwa kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat melalui institusi seperti *Bicentennial Framework* digunakan sebagai alat untuk

mengamankan kepentingan transnasional dengan membangun kepercayaan, menciptakan transparansi, dan memperkuat kontrol negara atas masyarakat. Ketika menghadapi sebuah ancaman, seperti kejahatan lintas batas, maka kerja sama menjadi pilihan rasional. Liberalisme menekankan pentingnya aktor internasional, norma dan saling ketergantungan dalam membangun stabilitas dan kepentingan bersama. Dalam hal ini, Meksiko dan Amerika Serikat memiliki kepentingan bersama yang kuat untuk menekan kekuatan Kartel Sinaloa dan menjaga stabilitas regional (Safiyanu Duguri et al., 2021).

Bicentennial Framework for Security, Public Health, and Safe Communities pada tahun 2021 merupakan bentuk kerja sama keamanan bilateral yang lebih komprehensif, dengan menggabungkan kesehatan, pengembangan masyarakat, dan keadilan sosial. Di bawah konsep kerja sama keamanan bilateral, kedua negara bekerja sama secara langsung melalui berbagai bentuk kolaborasi, seperti pertukaran informasi intelijen, pelatihan penegakan hukum, perencanaan bersama dalam menangani kelompok kriminal seperti Kartel Sinaloa, pengembangan manajemen dan pelatihan, serta berbagai bentuk bantuan kemanusiaan. Kedua negara berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab dan saling mendukung dalam menjaga keamanan regional. Kerjasama ini mencerminkan prinsip liberal yaitu, penanggulangan tindakan kriminal tidak hanya ditentukan oleh militer dan polisi, tetapi juga oleh kemampuan sistem adil, aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Velasco Álvarez, 2022).

Dalam penelitian ini, teori liberalisme digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat diwujudkan

melalui *Bicentennial Framework* sebagai respons terhadap permasalahan global, yakni kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kerangka kerja tersebut mencerminkan prinsip-prinsip liberal, seperti kerjasama antarnegara, institusionalisasi, diplomasi oleh organisasi non pemerintahan dan pembagian tanggung jawab dalam isu keamanan lintas batas. Selain itu, akan dibahas tantangan implementasi kerjasama ini dalam menangani kejahatan lintas negara dan menjaga stabilitas kawasan. Unsur-unsur seperti bentuk kerjasama, isu yang menjadi fokus kebijakan, serta dampaknya terhadap pengurangan aktivitas kriminal akan diuraikan lebih lanjut melalui kerangka konseptual yang digunakan peneliti.

2.1. Kerjasama Keamanan Bilateral

Kerjasama bilateral dapat dideskripsikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pemerintahan negara berdaulat dengan tujuan menemukan resolusi suatu isu dengan melakukan perundingan, membentuk perjanjian dan upaya lainnya yang melibatkan institusi non-pemerintahan. Kerjasama ini merupakan realisasi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi unsur-unsur pemerintahan yang terlibat dalam rangka menghadapi tantangan yang sama (Arya & Candra, 2022). Adapun Holsti memahami konsep kerjasama bilateral sebagai bentuk dari dua kepentingan maupun tujuan yang saling bertemu dan menghasilkan sesuatu untuk direalisasikan oleh pihak terkait dengan harapan hasil dari hubungan ini dapat membantu mencapai kepentingan bersama serta mengatur hubungan jangka panjang yang dirancang untuk memenuhi kepentingan yang ada. Konsep ini

dipandang sebagai hubungan dengan latar belakang kepentingan nasional yang sama dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (C. A. Pratiwi, 2021).

Dalam artikel ini kerjasama bilateral difokuskan pada isu keamanan pada ruang lingkup internasional. Keamanan internasional secara umum dapat dipahami sebagai kondisi dimana negara berupaya meminimalisir probabilitas terjadinya kerusakan pada aset yang dinilai berharga, seperti kedaulatan negara, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi, sumber daya alam dan identitas nasional. Konsep keamanan sendiri dalam hubungan internasional telah berkembang secara signifikan pasca perang dingin. Pada awalnya isu keamanan hanya berkorelasi pada perlindungan negara melalui militer dan pertahanan teritorial. Dikenal sebagai keamanan tradisional, konsep ini hanya berfokus pada negara, yaitu negara merupakan sumber ancaman dan juga sebagai pencipta stabilitas, dimana hanya terdapat dua strategi keamanan yaitu menyeimbangkan kekuasaan (*balancing*) dan menyatakan keberpihakan untuk mendapat keuntungan (*bandwagoning*). Konsep keamanan ini juga berorientasi dengan uang, senjata, tentara dan properti militer lainnya sebagai upaya menunjukkan kekuasaan untuk menciptakan keamanan (Adhikari, 2024).

Namun seiring berjalannya waktu konsep keamanan internasional berkembang lebih luas, konsep keamanan non-tradisional melihat konflik antaretnis, antaragama, migrasi ilegal, terorisme, krisis ekonomi membawa dampak besar yaitu ancaman bagi keamanan individu (*human security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), dan keamanan lingkungan (*environmental security*). Komunitas

internasional melihat pentingnya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dapat mempengaruhi keberadaan negara secara keseluruhan, sehingga berbagai bentuk ancaman seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, ketidaksetaraan menjadi prioritas dalam isu keamanan internasional (Rachman & Bainus, 2017).

Melihat perkembangan isu keamanan internasional yang melingkupi berbagai aspek masyarakat, kerjasama antar negara juga turut berkembang untuk menangani berbagai ancaman yang ada. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama keamanan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh *Defense Reform Initiative*. Melalui Defense Security Cooperation Agency (DSCA), U.S. Department of Defense (DoD) mendefinisikan kerjasama keamanan (*security cooperation/SC*) sebagai berbagai bentuk interaksi DoD dengan institusi asing baik negara maupun organisasi non pemerintahan dalam rangka membangun dan memperkuat pertahanan keamanan terutama bagi Amerika Serikat. Adapun tiga tujuan utama dari *security cooperation* yaitu, membangun dan mengembangkan kemampuan keamanan sekutu untuk pertahanan diri serta operasi multinasional, memberikan akses bagi angkatan bersenjata ke negara asing selama masa damai maupun operasi darurat, dan menciptakan hubungan yang mendukung kepentingan keamanan bersama (Schafer et al., 2024).

Douglas M. Faherty mendeskripsikan kerjasama keamanan sebagai segala bentuk kegiatan terstruktur, terorganisir dan dikelola secara formal yang mengatur interaksi antara entitas yang memiliki program yang bertujuan untuk membangun kesepahaman antar mitra untuk memastikan bantuan militer yang dapat diakses saat diperlukan. Menurut Faherty, realisasi kerjasama keamanan harus selaras dengan

tujuan nasional dengan memperluas pilihan kebijakan dan mencegah perkembangan tak terduga dari mitra kerjasama (Faherty, 2012). Dengan demikian, kerjasama keamanan bilateral dapat dipahami sebagai relasi antar dua institusi baik negara maupun organisasi internasional yang berlandaskan kepentingan bersama yaitu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk ancaman yang memiliki potensi membahayakan stabilitas internasional, dengan tujuan utama yaitu memperkuat sistem pertahanan serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dibawah yurisdiksi US Department of States (DoS), Foreign Assistance Act bersama Arms Export Control Act (AECA) telah menetapkan bentuk-bentuk kerjasama keamanan (Secretary of Defense, 2024), yaitu :

1. Hubungan Militer dan Militer (*Military to Military Engagements*)

Hubungan antara militer merupakan salah satu instrumen utama kerjasama keamanan pertahanan dalam rangka membangun hubungan strategis dengan mitra kerjasama. Terdiri atas pertukaran personel militer, pendanaan tambahan, kerjasama bilateral maupun regional yang bertujuan meningkatkan keterhubungan operasional (interoperabilitas) dengan mengembangkan konsep operasi militer bersama. Hubungan antar militer ini memiliki tujuan utama meningkatkan efektivitas operasi militer serta mengurangi risiko terhadap pasukan militer AS dan juga pasukan dari mitra kerjasama.

Dengan wewenang yang telah diberikan oleh US Department of States, US Department of Defense dapat melakukan pertukaran non timbal balik

dan mengesahkan pertukaran dengan kementerian non-pertahanan maupun organisasi keamanan regional dan juga internasional. Hubungan antar militer ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperlihatkan kapabilitas militer yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan jaminan keamanan dengan mitra kerjasama yang ada. Melalui berbagai bentuk keterlibatan yang ada, mitra kerjasama yang ada dapat memberikan partisipasi secara signifikan dalam operasi kontinjensi yang mendukung tujuan strategis Amerika Serikat. Partisipasi yang dapat diberikan berupa kontribusi pasukan dalam operasi koalisi, penyelenggaraan misi khusus, hingga penyediaan akses dan infrastruktur yang mendukung operasi militer.

2. Pelatihan dengan Tentara Asing (*Training with Foreign Forces*)

Sebagai salah satu bentuk kerjasama keamanan, pelatihan dengan tentara asing menjadi salah satu cara untuk menciptakan hubungan strategis dan meningkatkan operasional militer yang ada. *Joint Combined Exchange Training* (JCET) menjadi salah satu program utama yang dirancang untuk memberikan pelatihan bagi US Special Forces dalam menghadapi situasi nyata di lingkungan asing, yang juga membuka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasa, pemahaman budaya lokal serta adaptasi terhadap geografi regional. Pelatihan ini juga memberikan manfaat bagi mitra kerjasama Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan kontraterorisme, pencegahan perdagangan narkoba, dan juga mendukung operasi bantuan kemanusiaan serta respons bencana.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi stabilitas global US Department of Defense untuk mengantisipasi ancaman lokal yang menjadi krisis yang membutuhkan intervensi langsung pemerintah. Latihan jangka pendek di luar wilayah Amerika Serikat tidak hanya memberikan keuntungan bagi pasukan Amerika, tetapi juga memperdalam kapasitas militer mitra kerjasama dalam melaksanakan operasi keamanan bersama.

3. Dukungan Terhadap Operasi Militer (*Support to Operations*)

Bentuk kerjasama ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu partisipasi langsung pasukan militer Amerika Serikat dalam operasi militer serta memberikan dukungan operasional kepada mitra kerjasama sebagai substitusi keterlibatan langsung militer Amerika Serikat. Dukungan tersebut meliputi bantuan logistik, pasokan, pelatihan khusus, peminjaman peralatan militer, serta layanan kesehatan dan transportasi kepada mitra kerjasama. Terdapat skema penggantian biaya jika mitra kerjasama membutuhkan peningkatan kapasitas pengamanan perbatasan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan wilayah konflik sebagai upaya mitigasi terhadap mobilitas kelompok kriminal serta tindakan penyelundupan lintas negara.

Adapun sumber pendanaan seperti *Coalition Support Funds* (CSF) dan *Coalition Readiness Support Program* (CRSP) memainkan peran penting dalam mendukung mitra kerjasama yang terlibat dengan militer Amerika Serikat. Dana ini digunakan untuk penggantian biaya operasional yang telah disepakati, maupun untuk menyediakan pelatihan dan peralatan tanpa

penggantian. Partisipasi pasukan militer dari mitra kerjasama berkontribusi sebagai penggandaan kekuatan yang signifikan dengan mengurangi ketergantungan terhadap keterlibatan langsung militer Amerika Serikat, sekaligus meningkatkan efektivitas operasional dan legitimasi dalam melaksanakan operasi multinasional. Melalui bentuk kerjasama ini, terdapat strategi yang tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan mitra tetapi juga secara substansial berkontribusi terhadap stabilitas kawasan dan pemeliharaan kepentingan strategis Amerika Serikat dalam keamanan global.

4. Pendanaan untuk Kerjasama Pasukan Keamanan (*Partner Security Forces Funds*)

Pendanaan menjadi salah satu bentuk kerjasama yang bertujuan membangun kapasitas operasional mitra dalam menangani pemberontakan dan aktivitas terorisme. Melalui berbagai program pelatihan, penyediaan perlengkapan, modernisasi sistem dan dukungan logistik. Strategi ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat peran mitra dalam menjaga stabilitas kawasan.

Salah satu instrumen utama dalam kerangka ini adalah *Counter-ISIS Train and Equip Fund* (CTEF) yang memberikan fleksibilitas operasional bagi US Department of Defense untuk mendukung pasukan mitra terverifikasi di Irak dan Suriah. Dukungan CTEF ini mencakup pelatihan, peralatan militer, tunjangan, serta sistem pengawasan dan intelijen untuk memperkuat efektivitas operasi,

5. Kerjasama Pengurangan Ancaman Senjata Pemusnah Massal
(*Cooperative Threat Reduction Activities*)

Program kerjasama ini dibentuk berlandaskan *Cooperative Threat Reduction Act* (Public Law 113-291) yang merupakan inisiatif strategis US Department of Defense dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran senjata pemusnah massal (WMD) beserta material, teknologi, dan keahlian pendukungnya. Melalui kerjasama bilateral, multilateral, dan lintas lembaga, program ini bertujuan untuk menanggulangi ancaman kimia, biologis, dan nuklir terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan stabilitas global.

Cooperative Threat Reduction (CTR) mencakup *Biological Threat Reduction Program* (BTRP), *Proliferation Prevention Program* (PPP), *Global Nuclear Security* (GNS), *Chemical Security and Elimination* (CSE), serta *Delivery System Threat Reduction* (DSTR). Program-program ini dirancang untuk mendeteksi secara dini penyakit patogen yang berpotensi menimbulkan wabah atau digunakan sebagai senjata biologis, serta memastikan penghancuran, pengamanan, dan pengangkutan WMD secara aman. Selain itu, CTR juga memainkan peran penting dalam membangun kapasitas mitra internasional dengan tujuan mencegah proliferasi WMD melalui penguatan sistem pengawasan dan pengendalian lintas negara.

6. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Program ini menjadi salah satu komponen utama dalam kerjasama keamanan yang meliputi penyediaan alat pertahanan, layanan serta

penguatan kapasitas kelembagaan mitra. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam mempertahankan kedaulatan, menghadapi tantangan keamanan regional, serta memperdalam hubungan berdasarkan kepentingan bersama. Kerjasama ini bersifat terpadu dan tidak hanya berfokus pada pembangunan kapasitas inti, tetapi juga pada kemampuan mengelola dan mempertahankan kapabilitas tersebut. Nilai-nilai supremasi hukum seperti kontrol sipil atas militer, hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum konflik bersenjata juga terintegrasi dalam pelaksanaan kerjasama, dengan melibatkan kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri sebagai badan pengawas.

Melalui pendanaan dari *International Security Cooperation Programs (ISCP)*, US Department of Defense mendukung program pelatihan, pengadaan perlengkapan serta penguatan kapasitas kelembagaan mitra kerjasama. Program ini dijalankan berdasarkan kerangka hukum dan juga inisiatif regional seperti *Indo-Pacific Maritime Security*, dan *Women, Peace and Security*. Perencanaan kebutuhan kerjasama dilakukan oleh Komando Tempur Wilayah melalui *Significant Security Cooperation Initiatives (SSCI)* yang terkoordinasi dengan program US Department of States. Tak hanya itu, *International Counterproliferation Program* juga terlibat dalam mendukung peningkatan kapasitas mitra internasional dalam mencegah dan mengatasi penyebaran senjata pemusnah massal, melalui pelatihan, penyediaan peralatan, dan pengembangan doktrin yang selaras dengan strategi dan tujuan militer Amerika Serikat.

7. Program Pendidikan dan Pelatihan (*Educational and Training Activities*)

Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung kerjasama keamanan, khususnya dalam mengoptimalkan pertukaran informasi, memperkuat hubungan antarpersonel, serta meningkatkan interoperabilitas antara Amerika Serikat dengan mitra kerjasamanya. Program-program seperti *Regional Centers for Security Studies*, *Western Hemisphere Institute for Security Cooperation* (WHINSEC), *Service Academy International*, dan *Regional Defense Fellowship Program* (RFDP) memiliki peran dalam memberikan pendidikan profesional dan pelatihan teknis yang selaras dengan tujuan strategis Amerika Serikat. Seperti *Aviation Leadership Program* (ALP) menyediakan pelatihan bagi pilot dari negara berkembang, sedangkan *Inter-American* dan *Inter-European Air Forces Academies* memperkuat kemampuan mitra melalui pendidikan gabungan berbasis kebutuhan kawasan. *Regional Centers* dirancang secara khusus untuk memperluas jaringan komunitas keamanan, memperkuat tata kelola pertahanan, dan mendorong kepatuhan terhadap norma internasional dalam isu keamanan.

Selain itu, *Regional Defense Fellowship Program* memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas strategis dan operasional mitra dalam menghadapi tantangan terorisme melalui pelatihan khusus, penguatan jaringan alumni, dan pendekatan berbasis kawasan. Di sisi lain, *Irregular Warfare Center* (IWC) bertugas menyelaraskan konsep, kurikulum, dan pelatihan terkait

peperangan non-konvensional di seluruh institusi pertahanan, serta menjembatani koordinasi dengan lembaga sipil dan internasional. Keterlibatan internasional dalam kerjasama ini berperan untuk menginternalisasi nilai-nilai demokratis seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kontrol sipil atas militer.

8. Pengembangan Manajemen, Infrastruktur dan Tenaga Kerja
(Management, Infrastructure and Workforce Development)

Bentuk kerjasama ini mencakup kegiatan yang mendukung tata kelola, pengawasan, dan pengembangan kapasitas kerjasama keamanan. Kerjasama ini berfokus pada profesionalisasi tenaga kerja, pelaksanaan *Assesment, Monitoring and Evaluation (AM&E)*, serta manajemen program melalui Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Lembaga lain yang terlibat seperti Defense Institute of International Legal Studies (DIILS) dan Institute for Security Governance (ISG) memainkan peran penting dalam membangun kapasitas hukum dan kelembagaan mitra dalam menjalankan fungsi keamanan yang sesuai dengan hukum. DIILS memberikan pelatihan dalam bidang hukum operasional, keamanan maritim, konflik siber dan hibrida, serta hukum humaniter. Di sisi lain, ISG memperkuat tata kelola sektor pertahanan keamanan melalui konsultasi kelembagaan dan pelatihan strategis demi mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Adapun evaluasi strategis independen dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan hasil investasi, serta memperbaiki

strategi, kebijakan, dan alokasi anggaran. Pada sisi manajerial, pengelolaan program mencakup biaya operasional, teknologi informasi, manajemen data, hingga infrastruktur fisik. Pengembangan sumber daya manusia dalam kerjasama keamanan juga menjadi prioritas, dimana dengan pelatihan serta sertifikasi profesional yang diwajibkan oleh hukum untuk memastikan kompetensi tinggi dalam mendukung kebijakan keamanan yang terbentuk.

9. Program Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Assistance Activities*)

Melalui US Department of Defense, Amerika Serikat mengimplementasikan berbagai bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta dukungan sipil internasional sebagai bagian dari strategi kerjasama keamanan. Program ini tidak hanya bertujuan sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan akibat konflik, tetapi juga memfasilitasi pelatihan tanggap darurat bersama militer mitra kerjasama, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak yang terlibat. Dukungan pendanaan melalui skema *Overseas Humanitarian, Disaster and Civic Aid* (OHDACA) turut memperkuat kerjasama keamanan dengan memperluas kapasitas operasional, serta meningkatkan akses, pengaruh, dan eksistensi US Department of Defense pada kawasan prioritas. OHDACA sendiri terdiri atas *Humanitarian Assistance* (HA) yang menanggulangi kondisi darurat sosial ekonomi, *Humanitarian Mine Assistance* (HMA) yang mengelola bahaya ranjau dan bahan peledak sisa perang, serta *Foreign Disaster Relief* (FDR) yang mendukung upaya penanganan bencana asing.

Seluruh program ini diarahkan untuk mendukung populasi sipil melalui penguatan struktur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pengurangan risiko bencana untuk merealisasikan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Secara khusus program HMA, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam kegiatan pembersihan ranjau dan manajemen keamanan persenjataan dengan pendekatan berbasis pelatih lokal. Dalam merespon bencana internasional, US Department of Defense menyediakan bantuan logistik dan kemampuan militer yang tidak dimiliki oleh lembaga sipil untuk mendukung peran USAID dan US Department of States. Adapun inisiatif *Continuing Promise* yang diselenggarakan oleh US Navy berfungsi sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan yang menggabungkan layanan bantuan medis, pelatihan multisektorial dan pertukaran informasi di kawasan Amerika Tengah, Selatan serta Karibia yang dirancang sebagai platform misi alternatif yang berfokus pada isu kesehatan global dan kerjasama sipil.

Melihat berbagai bentuk kerjasama yang telah ditetapkan, dapat kita lihat bahwa kerjasama keamanan antar negara ini memiliki peran yang sangat penting bagi dunia internasional. Dimana berbagai aspek dari yang bersifat tradisional seperti konflik militer dan non-tradisional seperti kejahatan lintas negara dan bencana kemanusiaan menjadi bagian dari kerjasama tersebut, sehingga negara-negara yang ada memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman baik dari dalam maupun luar negara mereka sendiri.

Terutama bagi negara yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam menjaga dan melindungi sistem pertahanan dan keamanannya, hubungan kerjasama keamanan dalam hal ini secara bilateral berfungsi sebagai instrumen yang mampu memberikan kapabilitas dan meningkatkan kapasitas negara tersebut dalam merespons berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas nasionalnya.

Akan hal ini, kaum liberalisme mendukung upaya kerjasama antara institusi internasional dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan. Liberalisme meyakini sistem dunia internasional yang terdiri atas manusia dan masyarakat dapat diperbaiki dan menghindari perang sebagai kondisi alami politik dunia. Untuk menghadapi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, negosiasi dan kompromi diperlukan tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan, yaitu melalui kerjasama keamanan bilateral yang juga dapat melibatkan perusahaan multinasional, aktor transnasional dan organisasi internasional tanpa menyampingkan peran negara dalam panggung politik dunia. Kaum liberal memandang negara terdiri atas aktor-aktor yang memiliki preferensi dan kepentingannya masing-masing, sehingga dalam mewujudkan stabilitas nasional tidak semata-mata negara memainkan peran tunggal, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai institusi yang terkait. Interdependensi yang terjadi antara aktor internasional menjadi kekuatan utama yang saling memperkuat dalam menghadapi berbagai ancaman yang memungkinkan terjadi (Dunne et al., 2013).

Pandangan politik dunia oleh kaum liberal adalah sistem tawar-menawar yang kompleks diantara berbagai aktor untuk merancang kerjasama yang dapat

menghasilkan sistem politik maupun ekonomi yang baik bagi setiap aktor yang terlibat. Perlu dipahami, kaum liberal juga melihat pentingnya kekuatan militer dari sebuah negara tetapi tidak seperti realis yang berorientasi hanya pada negara dan kekuatan militer semata, karena kepentingan nasional dinilai lebih dari sekedar itu, dimana turut melibatkan isu ekonomi, lingkungan dan juga teknologi. Secara hukum, negara memiliki kedaulatan tetapi dalam praktik dunia internasional diperlukan negosiasi dengan berbagai aktor internasional untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan sebagai kepentingan bersama (Baylis et al., 2021).

Bertolak belakang dengan pandangan liberal, pendekatan realisme melihat bahwa politik internasional akan selalu memiliki konflik kepentingan dan penuh ketidakpastian, dimana terdapat dinamika persaingan antarnegara yang tidak bisa hilang sepenuhnya. Negara-negara yang ada memiliki rasa saling takut satu sama lain dan akan selalu bersaing untuk memperoleh kekuasaan yang lebih. Dimana tujuan mereka adalah memaksimalkan posisi strategis negara mereka dalam sistem internasional meskipun harus menimbulkan kerugian bahkan mengorbankan negara lain. Realis berpendapat sistem internasional mendorong negara-negara bersikap ofensif dan agresif sebagai cara untuk memperoleh dan mempertahankan kelangsungan hidup dan keamanan nasional. Meskipun negara harus melakukan upaya kerjasama untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan mereka, ketidakpastian terhadap intensi negara lain akan menjadi alasan ketidakpercayaan mereka sehingga negara akan selalu mempertahankan kapabilitas militer yang ofensif sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman eksternal (Mearsheimer, 2001).

Berdasarkan judul penelitian yang ada, penulis akan mengidentifikasi kerjasama keamanan bilateral antara Meksiko dan Amerika Serikat menggunakan 3 aspek kerjasama keamanan yang diatur oleh US Department of States, yaitu bidang militer, bidang pengembangan kapasitas dan sumber daya, serta bidang kemanusiaan. Bidang militer terdiri atas Hubungan Militer dan Militer, Pelatihan dengan Tentara Asing, Dukungan terhadap Operasi Keamanan, dan Pendanaan untuk Kerjasama Pasukan Keamanan. Bidang pengembangan kapasitas dan sumber daya terdiri atas Pengembangan Kapasitas, Program Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Manajemen, Infrastruktur dan Tenaga Kerja.

2.2.Kejahatan Transnasional

Setelah berakhirnya perang dingin, isu keamanan non tradisional mengalami perkembangan signifikan, terutama pada isu keamanan manusia (*human security*). Isu keamanan tidak lagi dibatasi dengan ancaman militer dan konflik bersenjata, namun telah meluas menjadi kejahatan transnasional. Para aktor kejahatan ini menjadi aktor penting dalam ekonomi ilegal global yang berpusat pada negara-negara lemah. Kejahatan ini memiliki karakter yang lebih sistematis dan bersifat lintas negara, yaitu aktor maupun aktivitas kriminalnya melampaui batas-batas kedaulatan negara. Melihat eskalasi isu ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation/UN*) menyelenggarakan forum khusus pada tahun 1990 untuk mendefinisikan dan menentukan strategi pencegahan serta penanggulangan kejahatan transnasional secara komprehensif (Prayuda & Harto, 2020).

Setelah melalui proses yang cukup panjang, UN membentuk The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime pada 15 November 2000, yang kemudian diresmikan pada Konvensi Palermo 12-15 Desember 2000. Melalui konvensi ini UN berhasil mendefinisikan dan mengidentifikasi berbagai bentuk dan kategori aktivitas kejahatan transnasional, yang akhirnya diresmikan pada 29 September 2003. UN mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai tindak kejahatan dengan skala yang lebih luas dan kompleks, yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang melakukan eksploitasi pasar ilegal yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Tindak kejahatan dianggap bersifat transnasional jika dilakukan oleh lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara tetapi bagian persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendaliannya dilakukan di negara lain, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat atas kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, dan dilakukan di satu negara tetapi memberikan dampak substansial di negara lain.

Adapun 18 kategori kejahatan transnasional yang dipublikasikan oleh UN yaitu ; perdagangan obat-obatan terlarang; perdagangan manusia; perdagangan organ manusia; perdagangan senjata, suku cadang, komponen dan amunisi ilegal; terorisme; kejahatan siber; pembajakan pesawat terbang; perompakan laut; pencucian uang; penipuan perbankan; penipuan asuransi; korupsi; penyuapan pejabat publik; penyuapan pejabat partai politik; pencurian artefak seni dan budaya; kejahatan lingkungan hidup; pencurian kekayaan intelektual; dan infiltrasi bisnis legal (United Nations General Assembly, 2000).

Untuk menghadapi dan menangani kejahatan transnasional yang terus menerus berkembang, UNTOC telah mengatur beberapa instrumen kerjasama yang perlu dilakukan yaitu ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), kerjasama penegakan hukum, dan penyitaan aset (Livey, 2017). UNTOC memandang ekstradisi sebagai instrumen hukum formal yang telah sering diterapkan untuk menyerahkan pelaku kejahatan lintas negara kepada yurisdiksi yang berwenang untuk diproses secara hukum. Ekstradisi memiliki peran untuk memperkuat kerjasama internasional melalui penetapan standar minimum, termasuk kewajiban sebuah negara untuk melakukan ekstradisi apabila objek ekstradisinya memenuhi prinsip *double criminality*, sehingga membuka kemungkinan penggunaan konvensi sebagai dasar ekstradisi meskipun tidak terdapat perjanjian bilateral yang sesuai dengan hukum internasional yang mengatur hal ini. Pelaksanaan ekstradisi mengacu pada hukum domestik dan perjanjian yang berlaku antar negara terkait dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, tetapi efektivitasnya kerap terhambat oleh karena perbedaan sistem hukum dan persyaratan pembuktian antarnegara.

Dalam menghadapi kejahatan transnasional, dibutuhkan juga *mutual legal assistance* sebagai mekanisme formal yang mengatur pemberian bantuan hukum lintas negara dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Mekanisme MLA terdiri atas pertukaran bukti, informasi, dokumen, pemanggilan saksi, dan pemindahan narapidana. Pelaksanaan MLA dapat ditolak apabila tidak memenuhi prinsip *double criminality*, namun UNTOC melarang penolakan semata-mata dengan alasan kerahasiaan. UNTOC mewajibkan penunjukan otoritas pusat

untuk menerima dan memproses permintaan MLA, dengan tujuan memperluas kerjasama, meminimalisir hambatan dalam proses pembuktian, dan mendorong penyusunan perjanjian baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

Kerjasama penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 UNTOC memiliki cakupan yang lebih komprehensif, dengan fokus pada *police-to-police cooperation* sebagai sarana yang memfasilitasi kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional. Kerjasama ini menekankan penguatan jalur komunikasi antar aparat penegak hukum, keamanan dalam pertukaran informasi, pertukaran personel termasuk penempatan *liaison officer*, serta identifikasi dini tindak pidana melalui langkah administratif. Memiliki sifat yang adaptif, kerjasama penegakan hukum ini dapat diimplementasikan menyesuaikan dengan sistem hukum domestik masing-masing negara, termasuk menghadapi kejahatan yang berbasis teknologi. Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga sebagai tindakan preventif dan juga menanggulangi seluruh bentuk kejahatan transnasional.

UNTOC juga mengatur langkah-langkah formal untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita, dan merampas berbagai bentuk aset serta hasil kejahatan untuk mencegah penggunaannya oleh anggota kelompok kriminal terorganisir yang terlibat. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi, mengadopsi mekanisme perampasan hasil kejahatan termasuk aset pengganti tanpa terhalang kerahasiaan bank, dan mendorong pembalikan beban pembuktian kepada pelaku kejahatan dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki niat baik.

Melalui konvensi ini, telah diatur berbagai prosedur jika aset berada di negara lain serta tahap akhir pengelolaan aset hasil sitaan yang menyesuaikan dengan hukum domestik yang ada. Prioritas utama UNTOC dalam mengelola aset ini adalah mengembalikan kepada korban ataupun pemilik sah, serta memiliki kemungkinan dilakukan pembagian hasil kepada negara maupun organisasi internasional yang terlibat.

Berdasarkan laporan oleh the National Research Council dalam tulisan James O. Finckenauer, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kejahatan transnasional yaitu ; globalisasi ekonomi; meningkatnya jumlah dan heterogenitas imigran; berkembangnya teknologi komunikasi. Ketiga faktor ini bukanlah faktor penyebab, melainkan faktor yang memfasilitasi terjadinya kejahatan transnasional. Seperti halnya isu imigran, imigrasi bukanlah tindak kriminalitas, tetapi melonjaknya angka masyarakat yang ingin bermigrasi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah akan memicu terjadinya imigrasi ilegal yang rentan dieksploitasi oleh organisasi kriminal. Perlu dipahami bahwa latar belakang kejahatan transnasional tidak berbeda jauh dengan kejahatan pada umumnya yaitu uang dan kekuasaan, namun pada konteks kejahatan transnasional aktor dan aksi kriminal yang terjadi melewati batas wilayah suatu negara dan membawa dampak bagi lebih dari satu negara (Finckenauer, 2000).

Sedangkan menurut Albanese, pertumbuhan dan perkembangan berbagai bentuk kejahatan transnasional di sejumlah negara dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, yaitu regulasi pemerintah, kondisi perekonomian negara, tingkat efektivitas penegakan hukum, angka permintaan masyarakat akan sebuah barang

atau jasa, serta dinamika lingkungan sosial dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pasar. Secara umum kejahatan transnasional memiliki keterkaitan dengan dinamika globalisasi, yang mencerminkan kompleksitas dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi. Kompleksitas ini berakar pada pandangan bahwa kejahatan berkembang menjadi suatu bentuk aktivitas ekonomi yang berjalan secara sistematis dalam dunia internasional. (Prayuda, 2020).

Menurut Van Dijk, kejahatan transnasional dapat dilihat dari dua sisi yaitu secara makro dan mikro. Dimana kejahatan transnasional makro mencakup spektrum yang luas dari berbagai aktivitas kriminal yang melibatkan jaringan kriminal global dan lokal, sedangkan kejahatan transnasional mikro mengacu pada operasi berskala lebih kecil dari tindakan-tindakan tersebut yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal lokal di wilayah yang lebih terfokus. Kelompok-kelompok ini memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ilegal dalam yurisdiksi nasional tertentu. Dalam prosesnya, aktor kejahatan transnasional mikro memainkan peran yang sangat penting, dimana kejahatan ini berlangsung secara lintas negara dan membutuhkan tenaga dari *unskilled-labor* di wilayah operasi kriminal untuk menjalankan aksinya (Numadi & Ma'rifat, 2023).

Karena sifat kerahasiaan dari aksi kejahatan-kejahatan ini, keterlibatan aktor lokal menjadi sangat penting untuk meminimalkan visibilitas, membatasi pergerakan dan komunikasi secara langsung oleh para aktor utama kejahatan ini. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, semakin memungkinkan bagi para pelaku makro kejahatan transnasional untuk tetap terpisah dari operasi di

lapangan, dan mendelegasikan tanggung jawab implementasi dan komunikasi kepada aktor mikro yang terlokalisasi.

Dalam isu kejahatan transnasional, kartel merupakan salah satu aktor yang memainkan peran penting dalam dunia kriminal internasional. Istilah kartel sendiri berasal dari abad kesembilanbelas dari bahasa Jerman yaitu *kartell* yang memiliki arti aliansi perusahaan. Di wilayah Eropa, kartel dianggap legal dan dibentuk untuk menghindari persaingan antar perusahaan besar dan kartel dapat mendukung stabilitas industri negara. Lain halnya dengan di kawasan Amerika, terutama setelah perang dunia kedua, kartel dilihat sebagai ancaman terhadap ekonomi pasar bebas. Setiap tahunnya jumlah kartel terus bertambah akibat persaingan usaha antar kartel yang membenarkan perkembangan kejahatan transnasional itu sendiri. Meskipun kartel cenderung menghancurkan kelompoknya sendiri, dalam praktiknya kartel tetap eksis melakukan aksi kriminal mereka selama bertahun-tahun yang menimbulkan banyak kerugian bagi perekonomian nasional (Bruneckienė et al., 2015).

Penelitian ini akan mengkaji kerjasama keamanan bilateral antara pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat melalui *Bicentennial Framework* dalam upaya memberantas kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kartel sinaloa. Sebagai kerangka kerjasama terbaru yang menggantikan *Merida Initiative*, *Bicentennial Framework* memiliki peran penting untuk menangani, menanggulangi dan mencegah berbagai tindakan kejahatan transnasional yang telah berkembang selama beberapa dekade di wilayah Meksiko dan Amerika Serikat. Berdasarkan klasifikasi oleh UNTOC pada tahun 2003, kejahatan transnasional mencakup

perdagangan obat-obatan terlarang; perdagangan manusia; perdagangan organ manusia; perdagangan senjata, suku cadang, komponen dan amunisi ilegal; terorisme; kejahatan siber; pembajakan pesawat terbang; perompakan laut; pencucian uang; penipuan perbankan; penipuan asuransi; korupsi; penyuapan pejabat publik; penyuapan pejabat partai politik; pencurian artefak seni dan budaya; kejahatan lingkungan hidup; pencurian kekayaan intelektual; dan infiltrasi bisnis legal. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana *Bicentennial Framework* berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat dalam menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kartel Sinaloa.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini hadir sebagai kontribusi ilmiah yang bersifat orisinal dan belum banyak memperoleh perhatian dalam kajian sebelumnya. Mengingat kompleksitas permasalahan global yang diangkat yakni keamanan transnasional, maka diperlukan rujukan pada studi-studi yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu akan berperan sebagai dasar penguatan argumentasi teoritis dan metodologis. Berikut beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan fokus kajian yang diangkat :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul Tulisan	Tujuan	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Implementasi Kerjasama Merida Initiative Antara Amerika Serikat dan Meksiko Dalam Penanggulangan	Menganalisis implementasi kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan	Kerjasama Internasional	Merida Initiative diimplementasikan melalui dua jalur utama, yaitu kerjasama antara FBI dan DEA dengan institusi di Meksiko, dan	Penelitian berfokus pada implementasi Merida Initiative pada tahun 2008-2010, tidak mencakup

Peredaran Narkoba Ilegal (2008-2010) oleh Mega Wahyu Pratiwi (2018)	Meksiko melalui Merida Initiative		bantuan militer berupa pendanaan sebesar USD 1,3 miliar	perkembangan ditahun 2018
Efektivitas Kerjasama Meksiko Dengan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba (Merida Initiative Pada Tahun 2007-2012) oleh Jamil Reza (2020)	Menilai efektivitas kerjasama Merida Initiative antara Meksiko dan Amerika Serikat	Kerjasama Internasional	Kerjasama dinilai efektif dalam menekan kekuatan kartel dan meningkatkan penangkapan, tetapi terhambat oleh tingginya angka pelanggaran HAM dan korupsi yang mengurangi keberhasilan jangka panjang	Penelitian berfokus menilai efektivitas Merida Initiative tahun 2007-2012, tidak mencakup perkembangan ditahun 2020
Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations di Meksiko oleh Almira Farah Jelita, Khairur Rizki, Sirwan Yazid Bustami (2020)	Menganalisis upaya Meksiko dan Amerika Serikat dalam kerjasama bilateral Merida Initiative untuk mengurangi drug trafficking organizations di Meksiko	<i>Transnational Organized Crime</i> Kerjasama Bilateral	Merida Initiative berhasil meningkatkan kapasitas pemberantasan narkoba dan reformasi sistem peradilan di Meksiko, tetapi belum mampu menekan kemunculan kartel baru dan angka kekerasan terkait narkoba	Penelitian berfokus pada upaya pengurangan aktivitas drug trafficking organizations di Meksiko
Kebijakan Meksiko Untuk Menandatangani Merida Initiative Untuk Menghadapi Drug Trafficking Organizations Dengan Amerika Serikat di Meksiko 2007-2012 oleh Retno Afifah Puspita (2023)	Menjelaskan bagaimana kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat menghadapi Drug Trafficking Organizations Tahun 2007-2012	Kerjasama Internasional	Merida Initiative berhasil menjadi kolaborasi strategis antara Meksiko dan Amerika Serikat, namun terhambat akibat korupsi, pelanggaran HAM, dan ketergantungan pihak eksternal	Penelitian ini membahas keberhasilan kerjasama dan tantangan yang dihadapi kedua negara pada periode 2007-2012
Implementasi Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko Melalui Bicentennial Framework Dalam Menghadapi Drugs Trafficking Organization di Perbatasan Pada Tahun 2021-2023 oleh Satrio Tamam Afif (2023)	Mengetahui strategi Bicentennial Framework dilaksanakan dengan optimal untuk menghadapi aktivitas DTO dipbatasan AS-Meksiko pada tahun 2021-2023	Kejahatan Transnasional <i>Theory of Change</i>	Bicentennial Framework yang mengutamakan kualitas hidup masyarakat berhasil menurunkan kekerasan sipil dan penyelundupan narkoba, tetapi belum seluruh misi kerangka kerja ini terpenuhi pada periode ini	Penelitian ini memiliki fokus utama pada strategi kerjasama Bicentennial Framework pada tahun 2021-2023
Implementasi Kerjasama	Mengetahui upaya apa saja	Keamanan Internasional	Bicentennial Framework mencakup	Penelitian ini memiliki fokus

Pemerintah AS dan Meksiko Untuk Memberantas <i>Fentanyl</i> Drugs Trafficking Berdasarkan Kerangka Bicentennial Framework Pada tahun 2019-2024 oleh Annisa Andien Armadhani (2025)	yang telah dilakukan Pemerintah AS dan Meksiko dalam menghadapi serta memerangi illegal drugs trafficking terutama narkotika jenis fentanyl	<i>Security Cooperation</i>	kontak militer, bantuan negara, pelatihan multinasional berhasil menekan angka penjualan fentanyl dan menurunkan kematian akibat opioid sintetis meskipun menghadapi berbagai tantangan diplomatik	utama pada bagaimana Bicentennial Framework mengatasi DTO khususnya penjualan narkotika jenis fentanyl di wilayah perbatasan
--	---	-----------------------------	--	--

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Mega Wahyu Pratiwi pada tahun 2018 yang berjudul, “Implementasi Kerjasama Merida Initiative Antara Amerika Serikat dan Meksiko Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Ilegal (2008-2010)”. Penelitian ini menganalisis implementasi kerjasama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam penanggulangan peredaran narkotika ilegal melalui *Merida Initiative* pada periode 2008-2010, yang mencakup kerjasama antara lembaga penegak hukum yaitu FBI dan DEA bersama dengan aparat Meksiko, dan berbagai bantuan militer dan teknis dari Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini menghasilkan berbagai program intelijen, operasi gabungan, pelatihan, dan penyediaan militer yang signifikan, seperti pesawat patroli, helikopter, sistem inspeksi non-intrusif, serta penguatan kapasitas penegakan hukum dan peradilan Meksiko. Dimana secara keseluruhan, kerjasama ini berhasil memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi kartel narkotika dan kejahatan transnasional. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada bentuk kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat,

dimana pada penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2008-2010 ketika *Merida Initiative* baru saja diberlakukan.

Penelitian selanjutnya dinilai relevan adalah penelitian yang berjudul “Efektivitas Kerjasama Meksiko Dengan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba (Merida Initiative Pada Tahun 2007-2012)” yang ditulis oleh Jamil Reza pada tahun 2020. Penelitian ini menilai sejauh mana kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat mencapai tujuan utamanya, seperti memutus kekuatan organisasi kriminal, meningkatkan pengawasan perbatasan, meningkatkan kapasitas peradilan, serta menurunkan angka permintaan akan narkotika. Penelitian ini memberikan hasil bahwa meskipun *Merida Initiative* berhasil menangkap dan melemahkan banyak kartel narkoba, implementasi yang mengedepankan pendekatan militer di era Presiden Calderón menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya angka kematian warga sipil, pelanggaran HAM oleh aparat, dan berkembangnya korupsi di dalam institusi penegak hukum. Penelitian terdahulu ini memiliki fokus kerjasama yang berbeda dengan penelitian penulis, dimana penelitian oleh Reza masih berfokus pada *Merida Initiative* dan efektivitas kerjasama ini pada periode 2007-2012.

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang berjudul “Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations di Meksiko” yang ditulis oleh Almira Farah Jelita, Khairur Rizki, Sirwan Yazid Bustami pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis implementasi empat pilar *Merida Initiative* yang mencakup penghancuran kapasitas kartel narkoba, reformasi sistem peradilan, penguatan pengawasan perbatasan, serta

pembangunan komunitas masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini berhasil meningkatkan penangkapan pemimpin kartel, memperbaiki profesionalisme aparat, memperkuat infrastruktur perbatasan, dan membangun kesadaran hukum dimasyarakat. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penegakan hukum dan peningkatan kapasitas institusi, kerjasama ini tidak menutup kesempatan bagi kartel-kartel baru untuk berkembang, sehingga angka kekerasan akibat narkoba tidak mengalami penurunan yang signifikan. Penelitian ini memiliki fokus utama pada aktivitas *Drug Trafficking Organizations* (DTO) dan upaya kedua pemerintahan yang bekerjasama untuk meminimalisirnya melalui *Merida Initiative*.

Penelitian lainnya yang menjadi rujukan bagi penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Retno Afifah Puspita pada tahun 2023 yang berjudul “Kebijakan Meksiko Untuk Menandatangani Merida Initiative Untuk Menghadapi Drug Trafficking Organizations Dengan Amerika Serikat di Meksiko 2007-2012”. Penelitian ini menganalisis alasan Meksiko bekerjasama dengan Amerika Serikat melalui *Merida Initiative* untuk menghadapi bersama *Drug Trafficking Organizations* yang terjadi diwilayah mereka. Penelitian ini memaparkan latar belakang aktivitas DTO dan kondisi domestik Meksiko sebelum terbentuknya *Merida Initiative*. Penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi kedua negara dalam mengimplementasikan *Merida Initiative*, yaitu korupsi, keterlambatan pendanaan, pelanggaran HAM, serta ketergantungan Meksiko terhadap bantuan eksternal sehingga kerjasama ini dinilai belum optimal dalam menekan aktivitas DTO. Penelitian ini berfokus pada upaya meminimalisir angka

DTO dan berbagai hambatan yang dihadapi Meksiko dan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan *Merida Initiative*.

Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan tulisan penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Satrio Tamam Afif di tahun 2023 dengan judul “Implementasi Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko Melalui Bicentennial Framework Dalam Menghadapi Drugs Trafficking Organization di Perbatasan Pada Tahun 2021-2023”. Penelitian ini berfokus pada perubahan pendekatan kerjasama Amerika Serikat-Meksiko, yang awalnya menggunakan strategi yang erat dengan isu militer menjadi kerjasama yang mengutamakan kesehatan publik, keselamatan komunitas, dan penanganan tindakan kriminal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Bicentennial Framework* berhasil memperkuat diplomasi dan memperluas ruang kerjasama, tetapi dalam implementasinya pada periode 2021-2023 masih menghadapi kendala seperti ketimpangan sumber daya pada kedua negara, dan belum berhasil menjalankan seluruh rencana kerjasama yang ada.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Implementasi Kerjasama Pemerintah AS dan Meksiko Untuk Memberantas Fentanyl Drugs Trafficking Berdasarkan Kerangka Bicentennial Framework Pada tahun 2019-2024” yang ditulis oleh Annisa Andien Armadhani pada tahun 2025. Penelitian ini membahas masa transisi kerjasama antara AS dan Meksiko dari *Merida Initiative* ke *Bicentennial Framework*, dimana terdapat perubahan strategi militeristik menjadi pendekatan yang lebih berfokus kepada masyarakat, seperti pada aspek kesehatan, kualitas hidup, dan pencegahan perkembangan kriminalitas. Menurut

penelitian ini, ruang kerjasama antara kedua negara mengalami perkembangan yang signifikan tetapi efektivitasnya masih minim akibat perbedaan prioritas.

Keenam penelitian terdahulu (2018-2025) ini memiliki isu yang sama dengan penelitian penulis, yaitu pada kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat dalam menghadapi kejahatan transnasional, tetapi pada keempat penelitian terdahulu masih membahas kerjasama sebelumnya yaitu *Merida Initiative* serta efektivitas dan berbagai tantangan yang dihadapi. Dan pada dua penelitian terdahulu lainnya, terdapat fokus pada isu *Drugs Trafficking* di wilayah perbatasan, khususnya pada perdagangan fentanyl. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan menganalisis bentuk kerjasama terbaru diantara Meksiko dan Amerika Serikat yaitu *Bicentennial Framework* sebagai pembaharuan hubungan kerjasama diantara kedua negara dalam menghadapi seluruh jenis kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Kartel Sinaloa pada wilayah kedua negara selama periode 2021-2023, dan juga akan melihat tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam prosesnya.